

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Rancangan APBD DKI 2024 Disepakati Rp 81,7 Triliun

Gambir, Warta Kota

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati nilai rancangan APBD tahun 2024 sebesar Rp 81,7 triliun.

Besaran tersebut disepakati dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD hasil pembahasan lima komisi bersama Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) mitra pada 10 sampai 13 Oktober 2023 lalu.

"Berdasarkan hasil Raperda APBD bersama eksekutif rancangan Raperda APBD tahun 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059," kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berdasarkan keterangannya pada Kamis

(2/11/2023).

Besaran APBD 2024 terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 72,4 triliun. Dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 52,3 triliun, pendapatan transfer Rp 19,3 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 722,2 miliar.

Kemudian penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,2 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 5,4 triliun. Lalu rancangan belanja daerah sebesar Rp 72,5 triliun dengan rincian, belanja operasi Rp 58,8 triliun, belanja modal Rp 11,4 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 1,1 triliun dan belanja transfer Rp 318,3 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,7 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp 7,9 triliun dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp 1,8 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, belanja dDaerah sebesar Rp 72,5 triliun merupakan kegiatan yang telah disepakati masing-masing Komisi di DPRD DKI Jakarta bersama Satuan, Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD-UKPD) dan BUMD mitra.

"Komisi A sebesar Rp 12,4 triliun, komisi B sebesar Rp 9,5 triliun, komisi C sebesar Rp 3,8 triliun, komisi D sebesar Rp 14,6 triliun, dan komisi E sebesar Rp 32 triliun," ungkapnya. (faf)